

**PERAN ORGANISASI POKMASWAS LASKAR PEMUDA PEDULI  
LINGKUNGAN (LPPL) DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR  
PANTAI (STUDI DI AMPIANG PARAK KECAMATAN SUTERA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila Dan  
Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Pendidikan*



Oleh :

**RANI SAPUTRI**  
**TM/NIM : 2015/15052084**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2019**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Peran Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai (Studi Di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)

Nama : Rani Saputri

TM/ NIM : 2015/ 15052084

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

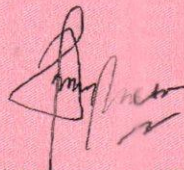
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 Oktober 2019

Disetujui Oleh :

**Pembimbing**



**Henni Muchtar, SH., M. Hum**

**NIP. 19640305 199003 2 010**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis, 17 Oktober 2019 Pukul 10.00-12.00 WIB

**Peran Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL)  
Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai (Studi Di Ampiang Parak  
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)**

Nama : Rani Saputri  
TM/ Nim : 2015/ 15052084  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Oktober 2019

Tim Penguji

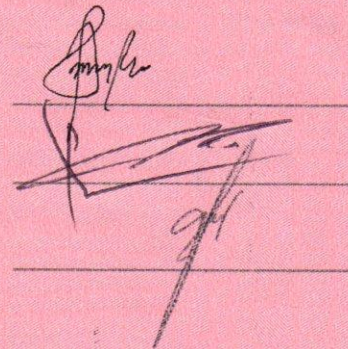
Nama

Tanda Tangan

Ketua : Henni Muchtar, SH., M. Hum

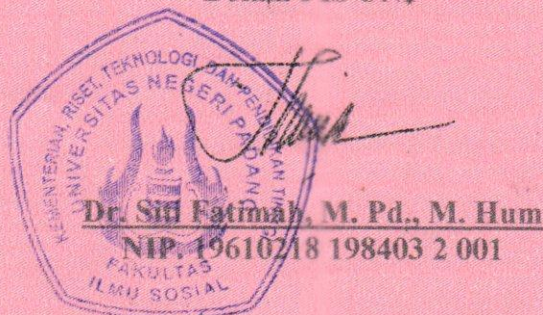
Anggota : Drs. Nurman S, M. Si

Anggota : Dr. Junaidi Indrawadi, M. Pd



Mengesahkan:

**Dekan FIS UNP**



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Saputri  
TM/ NIM : 2015/ 15052084  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Januari 1996

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “Peran Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai (Studi Di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)” adalah benar merupakan karya tulis saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun dimasyarakat dan negara.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Oktober 2019

Saya Yang Menyatakan



**Rani Saputri**  
**2015/ 15052084**

## **ABSTRAK**

### **Rani Saputri (15052084/ 2015) : Peran Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai (Studi di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)**

Penelitian ini dilatarbelakangi ikut sertanya masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak. Masyarakat yang aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai maka harus tergabung dalam organisasi yang disebut pokmaswas, sehingga terbentuklah organisasi pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL), kendala-kendala dalam pelaksanaan perannya, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian sebanyak 1 orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 1 orang dari Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, perwakilan dari Bupati Pesisir Selatan, wali kampung pasar ampiang parak, 2 orang dari kenagarian ampiang parak, 7 orang dari pokmaswas LPPL, dan 3 orang dari masyarakat. Data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran organisasi pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala yaitu kualitas sumber daya manusia masih rendah, bantuan yang diberikan oleh sumber dana masih minim, partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelamatan lingkungan pantai ampiang parak masih kurang, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan pantai ampiang parak. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan organisasi pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) untuk mengatasi kendala dalam dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai diantaranya adalah pelatihan dan sosialisasi, memberikan bantuan dana maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan anggota Pokmaswas LPPL, dan pembinaan.

**Kata Kunci:** Peran, Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan, Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah YME, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang berjudul : **“Peran Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai (Studi Di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Dr. Hasrul, M. Si dan Ibu Rita Anggraini, S. Pd., M. Pd selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3. Ibu Alia Azmi, S. IP., M. Si selaku Pembimbing Akademik tyang telah membantu penulis dalam kegiatan akademik.
4. Ibu Henni Muchtar, SH, M. Hum selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberi arahan dan masukan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Nurman S, M. Si dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M. Pd selaku tim penguji yang telah banyak memberikan saran, kritikan dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta Saldi dan Ibunda Tersayang Maryani yang selalu ada untuk memberikan semangat dan do'a serta kasih sayang yang tak ternilai harganya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk kakak dan abangku tersayang Herlina, Erna Yulianti, dan Henrizal yang selalu memberikan dukungan berupa materil dari awal hingga selesai perkuliahan.
9. Terkhusus sahabatku Chika, Vingki, Tiara, Rosa dan Wilda serta Nadia teman sepebimbinganku yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Bang Romi Saputra yang bersedia menyediakan waktunya untuk menemani penulis saat penelitian dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Civic Education angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Anggota Laskar Pemuda Peduli Lingkungan yang telah bersedia di wawancarai demi penyelesaian skripsi ini.

13. Berbagai pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut membantu hingga selesainya skripsi ini.

Semoga segala jasa Bapak Ibu dan rekan-rekan dapat menjadi pahala dan ridha Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai di masa yang akan datang dan digunakan bagi peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang.

Padang, 23 Oktober 2019

Rani Saputri

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	19
C. Batasan Masalah .....	19
D. Perumusan Masalah .....	20
E. Tujuan Penelitian .....	20
F. Manfaat Penelitian .....	21
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	
1. Wilayah pesisir pantai.....	23
a. Konsep Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan.....	23
b. Konsep wilayah pesisir dan Pantai.....	26
c. Manfaat Wilayah Pesisir Pantai .....	27
d. Kerusakan sumber daya di Wilayah Pesisir Pantai.....	29
e. Akibat kerusakan di wilayah pesisir bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat .....	33
f. Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai.....	34
2. Organisasi .....	
a. Konsep Organisasi .....	36
b. Peran Organisasi Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai.....	41
c. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Pengelolaan di Wilayah Pesisir Pantai .....	43
B. Kajian Kerangka Konseptual .....	44
<b>BAB III METODOLOGI</b>	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Informan Penelitian.....	48
D. Jenis Data .....	49
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Teknik Keabsahan Data .....	53
G. Teknik Analisis Keabsahan.....	55

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum .....	58
1. Gambaran Umum Nagari Ampiang Parak .....	58
2. Gambaran umum Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) .....	62
B. Temuan Khusus .....	68
1. Peran Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.....	68
2. Kendala-kendala yang dihadapi Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan .....	104
3. Upaya Pemerintah Daerah dan Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) untuk mengatasi kendala- kendala dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai Di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.....	117
C. Pembahasan.....	128
1. Peran Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.....	128
2. Kendala-kendala yang dihadapi Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan .....	133
3. Upaya Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) untuk mengatasi kendala- kendala dalam mengelola wilayah pesisir pantai Di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.....	137
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	140
B. Saran .....	142
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>144</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Bantuan dari pemerintah .....	9
Tabel 1.2	Bantuan dari institusi .....	9
Tabel 1.3	Bantuan Dari Swadaya.....	10
Tabel 1.4	Jumlah Dana Dari Hasil Jasa Pengangkutan .....	10
Tabel 1.5	Dana yang dibutuhkan dalam Pengelolaan Pantai .....	10
Tabel.1.6	Total Dana yang dibutuhkan dalam Pengelolaan Pantai.....	10
Tabel 1.7	Pendidikan terakhir anggota Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan .....	12
Tabel 1.8.	Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan penanaman bibit mangrove.....	14
Tabel 1.9	Sarana dan Prasarana yang telah ada dan belum ada dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai Ampiang Parak .....	15
Tabel 3.1	Informan Penelitian .....	48
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jenis kelamin .....	59
Tabel 4.2	Data Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	60
Tabel 4.3	Data Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	60
Tabel 4.4	Data Mata Pencaharian Penduduk Kenagarian Ampiang Parak...	61
Tabel 4.5	Berita Acara Musyawarah Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Tentang Perencanaan Program Kerja .....	70
Tabel 4.6.	Data tentang kegiatan memberikan edukasi tentang penyu ke berbagai masyarakat baik siswa, mahasiswa, maupun masyarakat umum .....	86
Tabel 4.7.	Kegiatan Mitigasi Bencana .....	88
Tabel 4.8	Kegiatan pembersihan pantai dari sampah secara rutin .....	92
Tabel 4.9	Mengajak Masyarakat Dalam Kegiatan Penyelamatan Lingkungan .....	95
Tabel 4.10	Pengawasan terhadap telur penyu (patroli malam) .....	101
Tabel 4.11.	Formulir Laporan Pengawasan Mangrove Periode Tahun 2015 – 2019.....	101
Tabel 4.12	Formulir Laporan Pengawasan Cemara Periode Tahun 2015 – 2019.....	102
Tabel 4.13	Pengawasan di Laut.....	103
Tabel 4.14	Kualitas sumber daya manusia.....	108
Tabel 4.15	Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyelamatan lingkungan	113
Tabel 4.16	Laporan Temuan Pelanggaran.....	127

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Pokmaswas LPPL.....	40
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual .....	46
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pokmaswas LPPL.....	66
Gambar 4.2	Rapat anggota Laskar Pemuda Peduli Lingkungan.....	69
Gambar 4.3	Memberikan edukasi tentang penyu kepada masyarakat umum .....	82
Gambar 4.4	Memberikan edukasi tentang penyu kepada siswa SMA.....	82
Gambar 4.5	Memberikan edukasi tentang penyu kepada siswa SD .....	83
Gambar 4.6	Media informasi seputar penyu .....	85
Gambar 4.7	Penanaman bibit mangrove oleh anggota LPPL bersama Tim Penanggulangan bencana nagari Amping parak, perwakilan dari masing-masing instansi dan masyarakat .....	87
Gambar 4.8	Kegiatan pembersihan pantai oleh anggota LPPL di zona kunjungan konservasi penyu.....	91
Gambar 4.9	Pengawasan terhadap pohon cemara laut.....	96
Gambar 4.10	Pengawasan terhadap tanaman mangrove .....	97
Gambar 4.11	Pengawasan terhadap tanaman mangrove yang baru di tanam ...	98
Gambar 4.12	Anggota LPPL sedang melakukan pengukuran jejak penyu....	100
Gambar 4.13	Bak penetasan telur penyu.....	114
Gambar 4.14.	Rumah Perawatan Penyu.....	114
Gambar 4.15	Dermaga 1 dan 2.....	114
Gambar 4.16	WC dan Musholla.....	114
Gambar 4.17	Fasilitas Permainan Anak-anak .....	114
Gambar 4.18	Sekretariat .....	115
Gambar 4.19	Pondok Informasi .....	115
Gambar 4.20	Teropong .....	117
Gambar 4.21	Kunjungan PSDKP Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 Februari 2019 .....	121
Gambar 4.22	Sosialisasi Rehabilitasi Terumbu Karang di Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan 19 Maret 2019.....	121
Gambar 4.23	Pelatihan Sformetrik genetika dan tagging penyu BSPL Padang pada tanggal 3-5 Desember 2018 .....	122

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Surat izin dari fakultas
4. Surat izin penelitian dari kesbangpol
5. Surat balasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
6. Surat balasan dari Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
7. Surat balasan dari organisasi pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wilayah pesisir pantai merupakan kawasan yang memiliki kekayaan sumber daya yang besar. Kekayaan sumber daya yang ada di wilayah pesisir pantai meliputi sumber daya hayati dan sumber daya nonhayati. Sumber daya hayati seperti ikan, hutan mangrove, padang lamun, *coral reef* (terumbu karang), estuari, dan biota laut lainnya. Sedangkan, sumber daya nonhayati seperti pasir, air laut dan mineral dasar laut. Dengan kekayaan sumber daya di wilayah pesisir pantai tersebut, hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan ekonomi yang berasal dari kegiatan perikanan, pariwisata, dan transportasi.

Kekayaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah pesisir pantai merupakan masa depan bagi masyarakat Indonesia, khususnya nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, adanya berbagai kegiatan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap sumber daya alam pesisir, seperti mangrove dan terumbu karang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kawasan pesisir antara lain kegiatan penangkapan ikan, pelabuhan dan perkapalan, penambangan karang dan pantai, kontruksi pembangunan laut, pariwisata, industri secara terus menerus akan menyebabkan kerusakan pada fungsi ekosistem di laut dan di darat. Oleh karena itu, wilayah pesisir perlu dikelola secara terpadu dan berbasis masyarakat agar dapat meminimalisir kerusakan pada wilayah pesisir.

Selain tujuan pengelolaan wilayah pesisir yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 4 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 3 bahwa:

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan:

- a. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologi secara berkelanjutan;
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan;
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang meliputi beberapa ekosistem (mangrove dan terumbu karang), sumber daya hayati dan non hayati, dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu demi tercapainya tujuan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Hal ini berdampak pada pengelolaan efektif untuk menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Sedangkan, pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat merupakan suatu sistem pengelolaan sumber daya pesisir, dimana masyarakat sekitar ikut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan wilayah pesisir. Dengan demikian, maka akan memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk tercapainya tujuan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan

yang berdampak pada kesejahteraan dan memperbaiki perekonomian masyarakat, serta memajukan desa yang ada di sekitar pantai.

Cara pengelolaan wilayah pesisir pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 5 bahwa:

“Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasal 62 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada pasal 4 yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam tahap : a) perencanaan, b) pelaksanaan, dan c) pengawasan.

Kenagarian Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu nagari yang wilayah pesisir pantai yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri yang tinggal di sekitar Pantai Ampiang Parak,

karena masyarakat tersebut aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai maka harus tergabung dalam suatu organisasi yang disebut pokmaswas. Sehingga, terbentuklah Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL). Latar belakang dibentuknya organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) adalah *pertama*, untuk menyelamatkan lingkungan khususnya lingkungan pantai dari keadaan gersang menjadi ruang terbuka hijau. *Kedua*, menyelamatkan hewan yang dilindungi dari Undang-Undang seperti penyu. *Ketiga*, mitigasi bencana alam misalnya menanam bakau dan cemara. Pengelolaan pantai ampiang parak mulai di laksanakan pada tahun 2013 sampai sekarang dan dibawah naungan Wali Nagari Ampiang Parak, Dinas Perikanan Pesisir Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dan BPSPL Padang. Tujuannya adalah untuk melestarikan wilayah pesisir pantai ampiang parak, mencegah kerusakan di wilayah pesisir pantai, melindungi penyu dari kepunahan, serta memanfaatkan sumber daya alam wilayah pesisir pantai untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Sebagai data awal penulis melakukan wawancara awal pada 01 Juli 2019 dengan bapak Haridman sebagai ketua organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) mengenai cara pengelolaan wilayah pesisir pantai ampiang parak meliputi, **kegiatan perencanaan:** (1) mengkonsepkan paket kunjungan, meliputi paket edukasi tentang penyu dan paket edukasi terkait pengurangan resiko, (2) merencanakan kawasan pantai ampiang parak sebagai kawasan ekowisata berbasis pengurangan resiko bencana, (3)

menyiapkan bibit cemara laut dan mangrove untuk kegiatan mitigasi bencana, (4) merencanakan pembuatan tracking mangrove, (5) mengusulkan kegiatan snorkeling dan diving, (6) mempersiapkan kegiatan penyelaman akses bangkai kapal belanda yang karang abad 1801, (7) merancang pembuatan sarana dan prasarana, seperti menara pantau, pos jaga, dan menara air bersih, (8) menyiapkan kebutuhan peralatan pengawasan, baik pengawasan di laut maupun di pantai.

**Pemanfaatan:** (1) menjadikan kawasan ekowisata, (2) memberikan pendidikan ke masyarakat baik siswa, mahasiswa ataupun masyarakat umum tentang penyu, (3) kegiatan penelitian, (4) penanaman mangrove dan cemara laut untuk melindungi pantai dari abrasi, (5) konservasi penyu. **Pengawasan:** pengawasan di laut dan di pantai.

Dalam rangka memperkuat peran serta organisasi pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai Ampiang Parak, Wali Nagari Ampiang Parak mengeluarkan SK (Surat Keputusan) No.225/01/KPTS-WN/AP/1-2013 pada 5 Januari 2013, diperkuat dengan Akta Notaris tahun 2016, kemudian dikukuhkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Selatan Nomor: 523/374/DKP-PS/XI-2015, lalu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat membuat surat keputusan Nomor: 235/SK-DKP-3/IX/2017 tentang penetapan Kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan sebagai mitra konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Adanya surat keputusan tersebut, dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir

pantai di nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari Dokumen profil organisasi pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan tugas dan fungsi organisasi Pokmaswa Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) sebagai berikut: (1) membantu pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan pada kawasan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil; (2) menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan atau adanya pelanggaran dan kejahatan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan; (3) menggunakan sarana dan atribut Pokmaswas secara tertib, hati-hati, dan bertanggung jawab; (4) melakukan pengawasan/patrol terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan, pantai secara cermat, hati-hati dan waspada; (5) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan aparat terkait di wilayah setempat antara lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui bidang perikanan tangkap atau Kepala Seksi Kelembagaan Perikanan, Satuan Polisi Air, Polsek, Pos Angkatan Laut (AL), Petugas Pengawas/ Pemantau sumberdaya kelautan dan perikanan (P2SDKP); dan (6) memberikan laporan tertulis maupun lisan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dalam segala bentuk aktifitas pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan. .

Hasil wawancara awal penulis dengan Suhelmi sebagai wali kampung pasar Ampiang Parak pada 03 Februari 2019, beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat, seperti dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat”.

Kemudian penulis melakukan wawancara awal dengan Sekretaris Wali Nagari Ampiang Parak yaitu Bapak Yendri (informan) pada 09 Januari 2019, beliau mengatakan bahwa:

“Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dibentuk berdasarkan keinginan anggotanya sendiri dan disahkan oleh wali nagari, legalitas melalui Surat Keputusan Wali Nagari Ampiang Parak No.225/01/KPTS-WN/AP/1-2013 pada 5 Januari 2013, diperkuat dengan Akta Notaris tahun 2016. Organisasi Pokmaswas LPPL dengan pemerintahan nagari mempunyai hubungan yang sangat erat dan mendukung semua kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Ampiang Parak”.

Di lihat dari tugas dan fungsi organisasi Pokmaswa Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai Ampiang Parak, maka perannya meliputi 3 tahap yaitu **Tahap perencanaan:** (1) mengkonsepkan paket kunjungan, meliputi paket edukasi tentang penyu dan paket edukasi terkait pengurangan resiko, (2) merencanakan kawasan pantai ampiang parak sebagai kawasan ekowisata berbasis pengurangan resiko bencana, (3) menyiapkan bibit cemara laut dan mangrove untuk kegiatan mitigasi bencana, (4) merencanakan pembuatan tracking mangrove (5) mengusulkan kegiatan snorkeling dan diving, (6) mempersiapkan kegiatan penyelaman akses bangkai kapal belanda yang karang abad 1801, (7) merancang pembuatan sarana dan prasarana, seperti menara pantau, pos jaga, dan menara air bersih, (8) menyiapkan kebutuhan peralatan pengawasan, baik pengawasan di laut maupun di pantai.

**Tahap pelaksanaan:** (1) memberikan edukasi ke berbagai masyarakat, mulai masyarakat umum, siswa, mahasiswa tentang penyu; (2) melakukan mitigasi bencana dengan penanaman bibit mangrove dan cemara

laut di sekitar pantai ampiang parak; (3) melakukan pembersihan pantai dari sampah plastik secara rutin; (4) mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola pantai Ampiang Parak. **Tahap pengawasan:** pengawasan di laut dan di pantai.

Hasil observasi yang penulis lakukan di Pantai Ampiang Parak, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Penulis mengamati bahwa ditinjau dari peran organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai Ampiang Parak pada tahap perencanaan, semua perencanaan yang telah di buat belum terlaksana. Hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan, pertama bantuan dari sumber dana masih minim. Bantuan tersebut meliputi bantuan berupa sarana dan prasarana serta peralatan, tetapi ada juga berupa uang.

Hal ini diperkuat saat penulis wawancara dengan ketua organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) yaitu bapak Haridman pada tanggal 03 Februari 2019, beliau mengatakan:

“Kegiatan pengelolaan lingkungan ini butuh biaya besar sementara sumber pembiayaan masih kecil, ada beberapa BUMN juga membantu, namun itu baru dari sarana fisik sedangkan sarana operasional belum”.

Berikut data mengenai bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah, institusi dan swadaya dapat dilihat pada tabel 1.1, tabel 1.2, dan tabel 1.3

**Tabel 1.1 Bantuan dari pemerintah**

No.	Uraian aset	Tahun perolehan	Nilai perolehan (Rupiah)	Asal Perolehan
1.	Pondok Informasi	2016	60.000.000,-	BPSPL Padang
2.	Mesin temple 5 PK		14.850.000,-	
3.	Papan himbauan		4.000.000,-	
4.	Bak Penetasan telur penyusu		5.000.000,-	
5.	Perahu		11.428.000	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 95.278.000,-</b>	
1.	Pondok wisata	2018	35.000.000,-	BPSPL Padang
2.	Matrass		3.000.000,-	
3.	Kursi dan meja		800.000,-	
4.	Tedmond		1.100.000,-	
5.	Radio RIG		7.000.000,-	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 46.900.000,-</b>	

No.	Uraian aset	Tahun perolehan	Nilai perolehan (Rupiah)	Asal Perolehan
1.	Alat selam	2017	150.000.000,-	KKP
2.	Mesin temple 15K		26.000.000,-	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 176.000.000,-</b>	

No.	Uraian aset	Tahun perolehan	Nilai perolehan (Rupiah)	Asal Perolehan
1.	Handy Talky	2018		PSDKP
2.	Teropong			
3.	Senter			
4.	Kamera			

(Sumber : Dokumen profil organisasi LPPL)

**Tabel 1.2 Bantuan dari institusi**

No.	Uraian aset	Tahun perolehan	Nilai perolehan (Rupiah)	Asal Perolehan
1.	Bak rawatan	2017	50.000.000,-	PLN
2.	Merk Lokasi		29.000.000,-	
3.	Mushalla dan WC		50.000.000,-	
4.	Gerbang		22.000.000,-	
5.	Dermaga		26.000.000,-	
6.	Kendaraan Sampah		37.000.000,-	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 214.000.000,-</b>	
1.	Play Ground	2018	25.000.000,-	PLN
2.	Kolam Anak-Anak		45.000.000,-	
3.	Sekretariat		45.000.000,-	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 115.000.000,-</b>	
1.	Gedung edukasi	2019	50.000.000,-	PLN
2.	Penambahan wc		30.000.000,-	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 80.000.000,-</b>	

(Sumber : Dokumen profil organisasi pokmaswas LPPL)

**Tabel 1.3 Bantuan Dari Swadaya**

No.	Uraian aset	Tahun perolehan	Nilai perolehan (Rupiah)	Asal Perolehan
1.	Lampu PLN	2017	5.000.000,-	Swadaya
2.	Rumah Perawatan Penyu		20.000.000,-	
3.	Sumur Bor		1.500.000,-	
4.	Pustaka		2.500.000,-	
5.	Perluasan pondok jaga		5.000.000,-	
6.	Perahu fiber bekas		3.000.000,-	
<b>Jumlah</b>			<b>37.000.000,-</b>	

(Sumber : Dokumen profil organisasi pokmaswas LPPL)

**Tabel 1.4 Jumlah Dana Dari Hasil Jasa Pengangkutan**

No.	Tahun	Jumlah dana
1.	2016	20.000.000,-
2.	2017	130.000.000,-
3.	2018	170.000.000,-
4.	2019 (Januari - Juli)	126.000.000,-

(Sumber : buku catatan organisasi pokmaswas LPPL)

**Tabel 1.5 Dana yang dibutuhkan dalam Pengelolaan Pantai**

No.	Tahap	Biaya	
1.	Perencanaan	Tracking Mangrove	Rp 150.000.000,-
		Menara Pantau	Rp 1.000.000.000,-
		Menara Air Bersih	Rp 50.000.000,-
		Motor RTV (2 unit)	Rp 90.000.000,-
		Kapal Patroli	Rp 250.000.000,-
		Pos jaga	Rp 300.000.000,-
<b>Jumlah biaya</b>		<b>Rp 1.840.000.000,-</b>	
2.	Pelaksanaan	BBM Perahu	Rp 200.000,-/hari x 30 hari = Rp 6.000.000,-
		BBM Kendaraan sampah	Rp 50.000,-/hari x 30 hari = Rp 1.500.000,-
		<b>Jumlah biaya</b>	<b>Rp 7.500.000,-</b>
3.	Pengawasan	Perawatan penyu dari kecil hingga besar	Rp 3.500.000,-
		Makanan penyu	Rp 80.000,-/ hari x 30 hari = Rp 2.400.000,-
		<b>Jumlah biaya</b>	<b>Rp 5.900.000,-</b>

(Sumber: Dokumen Organisasi Pokmaswas LPPL)

**Tabel 1.6 Total Dana yang dibutuhkan dalam Pengelolaan Pantai**

No.	Tahap	Biaya
1.	Perencanaan	Rp 1.840.000.000,-
2.	Pelaksanaan	Rp 7.500.000,-
3.	Pengawasan	Rp 5.900.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp 1.853.400.000,-</b>

Berdasarkan observasi, wawancara, dan data diatas (tabel 1.1 sampai 1.6) dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pemerintah maupun institusi berupa sarana, prasarana, peralatan, maupun uang belum mencukupi dalam pengelolaan di wilayah pesisir pantai Ampiang Parak. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk menambah sarana dan prasarana bersumber dari swadaya jika dana dari pemerintah maupun institusi (PLN) belum diberikan. Artinya dana yang didapatkan hasil dari jasa pengangkutan perahu dan patungan kelompok.

Dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan pesisir pantai Ampiang Parak berjumlah **Rp 1. 853.400.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)**. Sementara dana yang diperoleh dari hasil jasa pengangkutan pada tahun tahun 2019 (Januari - Juli) berjumlah **Rp 126.000.000,-** sehingga kekurangan dana berjumlah **Rp 1. 727.400.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)**. Dapat disimpulkan bahwa kekurangan dana dalam pengelolaan pesisir pantai Ampiang Parak masih sangat banyak. Organisasi pokmaswas LPPL tidak bisa menutupi kekurangan dana tersebut sehingga dalam pelaksanaan perannya kurang optimal.

Permasalahan kedua, kualitas sumber daya manusia masih kurang. Faktanya saat observasi langsung ke lapangan di Pantai Ampiang Parak tidak semua anggota pokmaswas LPPL bisa menjelaskan dan memberikan edukasi tentang penyus secara rinci kepada masyarakat. Terlebih lagi jika anggota yang telah ditentukan untuk mendampingi instansi tertentu untuk memberikan

edukasi tidak bisa hadir karena sakit sehingga dalam pelaksanaan perannya tidak berjalan dengan baik.

Penulis mewawancarai dengan Bapak Haridman sebagai Divisi Pengawas pengawas pantai dan laut. Berikut kutipan wawancaranya pada 03 Februari 2019:

“Anggota pokmaswas sudah menegtahui bahwa penyu itu adalah hewan yang di lindungi dan telurnya tidak boleh di konsumsi, tetapi dalam menjelaskan dan memberikan edukasi tentang penyu kepada masyarakat secara detail masih belum cukup terampil”.

Untuk memperkuat, terdapat data mengenai pendidikan terakhir anggota Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan dapat dilihat pada tabel 1.7.

**Tabel 1.7 Pendidikan terakhir anggota Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan**

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Haridman	S.Pt (Sarjana Peternakan)	Ketua
2.	Rinovoki	SMA	Sekretaris
3.	Sri Mulyati	SD	Bendahara
4.	Arifno Marza	SMA	Divisi Pengawas Pantai dan Laut
5.	Zulkifli	SD	Divisi Pengawas Pantai dan Laut
6.	Syamsudin	SD	Divisi Pengawas Pantai dan Laut
7.	Omricon	SD	Divisi Pengawas Pantai dan Laut
8.	Jasman	STM	Divisi Logistik
9.	Sepriadi	SMA	Divisi Logistik
10.	Yulbakhri	SD	Divisi Logistik
11.	Doni Arianto	SMA	Divisi Logistik
12.	Novendra Ariyanto	Sekolah Menengah Analisis Kesehatan	Divisi Perlindungan Penyu
13.	Yendri	SMA	Divisi Pelatihan dan Advokasi
14.	Yendi	SMA	Divisi Pelatihan dan Advokasi
15.	Syahrul Hidayat	SMA	Divisi Humas dan Dokumentasi

(Sumber : Wawancara dengan Bapak Syahrul sebagai divisi humas dan dokumentasi)

Berdasarkan observasi, wawancara, dan data diatas (tabel 1.7) dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anggota Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) yang pendidikan terakhirnya masih belum tinggi. Sementara, dalam pengelolaan pantai ampiang parak membutuhkan sumber daya manusia yang lulusan di bidang kelautan dan perikanan sehingga penguasaan terhadap pengetahuan bidang kelautan dan perikanan masih terbatas. Akibatnya dalam pelaksanaan perannya memberikan edukasi tentang penyuluhan belum berjalan dengan baik.

Permasalahan ketiga, partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelamatan lingkungan pantai ampiang parak masih kurang. Faktanya saat observasi langsung kelapangan di Pantai Ampiang Parak pada 4 Agustus 2019 saat melakukan penanaman mangrove sebanyak 5000 mangrove, masyarakat yang ikut serta berjumlah tiga orang orang selebihnya tim ASB, tim Penanggulangan Bencana Nagari Ampiang Parak, sekretaris nagari, polsek kecamatan sutera, wakil dari camat, wakil dari dinas pariwisata pesisir selatan, dan anggota Laskar Pemuda Peduli Lingkungan. Agar penanaman mangrove sebanyak 5000 selesai dengan cepat dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat, tetapi kenyataannya tidak semua masyarakat berpartisipasi untuk melakukan kegiatan tersebut.

Hal ini diperkuat saat penulis wawancara dengan Bapak Dendi Suprianto (45 tahun) pada tanggal 7 Agustus 2019, beliau mengatakan:

“Kalau minat ya masyarakat berminat untuk berpartisipasi dalam membantu kelompok laskar pemuda peduli lingkungan mengelola pantai ampiang parak, tapi masyarakat tidak bisa selalu ikut serta dalam kegiatan itu karena masyarakat hanya

sekedar membantu dan punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, seperti saya ini sebagai pedagang sembako”.

Berikut data mengenai keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai ampiang parak dapat dilihat pada tabel 1.8

**Tabel 1.8. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan penanaman bibit mangrove**

No.	Hari Tanggal	Waktu	Tempat	Peserta
1.	Minggu, 4 Agustus 2019	09.00 – 17.00	Pantai Ampiang Parak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan</li> <li>2. Kelompok tim penanggulangan bencana ampiang park</li> <li>3. Badan musyawarah nagari ampiang parak</li> <li>4. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>7. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga</li> <li>8. Camat Sutera</li> <li>9. Tenaga Pendampingan Desa (P3MD)</li> <li>10. Polsek Sutera</li> <li>11. Koramil</li> <li>12. Masyarakat: Putri, Zikri, dan Wesningsih.</li> </ol>

(Sumber : Dokumentasi Penelitian)

Dilihat observasi, wawancara, dan data diatas (tabel 1.8) dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir pantai Ampiang Parak. Hal ini juga dapat dilihat dari wawancara dengan masyarakat bahwa masyarakat tidak bisa selalu membantu pokmaswa LPPL karena punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelamatan lingkungan pantai ampiang parak masih kurang.

Permasalahan keempat, minimnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan pantai ampiang parak. Faktanya saat

observasi langsung kelapangan di Pantai Ampiang Parak pada 12 Juli 2019, sarana dan prasarana yang ada baru untuk kebutuhan dasar yang digunakan sebagai pariwisata. Sedangkan, untuk kebutuhan di lapangan dalam pengawasan pantai, seperti menara pantau dan motor RTV dan pengawasan di laut seperti kapal patroli belum tersedia sehingga dalam pelaksanaan perannya dalam tahap pengawasan tidak dapat di laksanakan dengan baik.

Hal ini diperkuat saat wawancara dengan Bapak Syahrul Hidayat sebagai divisi humas dan dokumentasi pada 12 Juli 2019, beliau mengatakan:

“kekurangan sarana dan prasarana di pantai Ampiang Parak ini masih banyak meliputi pengawasan di laut yaitu kapal patroli dan pengawasan di pantai adalah motor RTV dan menara pantau.

Untuk lebih diperkuat dapat dilihat dari data pada tabel 1.9

**Tabel 1.9 Sarana dan Prasarana yang telah ada dan belum ada dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai Ampiang Parak**

Sarana dan Prasarana yang telah ada	Sarana dan Prasarana yang belum ada
Armada angkut/perahu	Menara pantau
Pondok jaga dan rumah penetasan	Tempat pembibitan cemara laut
Sumur	Tenda patroli
Bak perawatan penyu	Transportasi motor RTV
Kolam anak-anak	Kapal patroli
Papan himbauan	Website
Bak penetasan telur penyu	Lampu taman
Play Ground	
Rumah perawatan penyu	
Sumur bor	
Perahu fiber bekas	
Radio RIG	
Pondok wisata	
Mushalla dan wc	
Dermaga	
Kendaraan sampah	
Alat selam	
Trafficon	
Matrass	
Sekretariat	
Tedmond	
Handy talky	
Teropong	

(Sumber : Dokumen profil organisasi pokmaswas LPPL)

Dari observasi, wawancara, dan data diatas (tabel 1.9) dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya sarana dan prasarana yang dibutuhkan Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai ampiang parak, seperti menara pantau, tempat pembibitan cemara laut, tenda patroli, lampu taman, transportasi motor RTV, kapal patroli, dan website,. Sarana dan prasarana tersebut sangat diperlukan untuk melaksanakan perannya, tetapi kenyataannya sarana dan prasarana tersebut belum tersedia sehingga tidak bisa melaksanakan perannya dengan sebaik mungkin terutama dalam kegiatan pengawasan.

Didalam latar belakang ini, penulis melakukan penelusuran terhadap bebrapa hasil penelitian untuk menunjukkan perbedaan substansial penelitian. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditelusuri sebagai berikut: penelitian pertama dengan judul “Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemah wungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)” yang diteliti oleh Endang Sutrisno pada tahun 2014. Hasil penelitiannya adalah implementasi yuridis pengelolaan sumber daya pesisir berbasis pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu telah memiliki regulasi sebagai pedoman dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional/ skala kecil.

Penelitian kedua dengan judul “Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis” yang diteliti oleh Ahmad Nawawi pada tahun 2013. Hasil penelitiannya adalah masyarakat

yang berada di kawasan wisata Pantai Depok ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan Pantai Depok, seperti pengelolaan sampah, pembuangan limbah cair, daur ulang sampah, pengadaan air bersih, dan evaluasi lingkungan. Selain berpartisipasi masyarakat juga bertanggung jawab atas keamanan Pantai Depok.

Penelitian ketiga dengan judul “Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pemanfaatan Tumbuhan Mangrove Sebagai Pangan Alternatif untuk Menghadapi Ketahanan Pangan” yang diteliti oleh Eka Fitriah pada tahun 2015. Hasil penelitiannya adalah persepsi masyarakat terhadap tumbuhan mangrove di kawasan desa Ambalu, masyarakat berpendapat bahwa hutan mangrove memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti berperan dalam mencegah pantai abrasi, tempat berkembang ikan, udang, dan kepiting. Bagi masyarakat dimanfaatkan sebagai kayu bakar, bahan bangunan, dan dapat dikonsumsi sebagai pangan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan mangrove cukup baik.

Penelitian keempat dengan judul “Strategi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Melalui Program Kampung Hijau di Kampung Margorukun Surabaya” yang diteliti oleh Wibowo Heru Prasetyo dan Totok Suyanto pada tahun 2013. Hasil penelitiannya adalah bentuk-bentuk partisipasi warga dalam kegiatan peduli lingkungan di Kampung Margorukun Surabaya meliputi (1) kerja bakti rutin; (2) penanaman dan perawatan tanaman; (3) pemilahan sampah; (4) perajangan sampah; (5) penggunaan komposter aerob; (6) pembuatan pupuk kompos; (7) penataan taman bermain; (8) arisan kaden

lingkungan dan PKK; (9) pembuatan tim yel-yel; (10) pengadaaan Bank Sampah. Strategi pendidikan karakter peduli lingkungan dalam keluarga di Kampung Margorukun meliputi (1) keteladanan dari orangtua dan kader lingkungan kampung Margorukun; (2) melalui penanaman kedisiplinan dengan mengikutsertakan anak dalam kegiatan peduli lingkungan di rumah dan masyarakat; (3) pembiasaan tanggung jawab melalui tugas membersihkan rumah; (4) integrasi dan internalisasi peduli lingkungan.

Penelitian kelima dengan judul “Komunitas Muda Urban Mengelola Sampah: Kajian Partisipatoris Gerakan Peduli Sampah Nasional di Kota Yogyakarta” yang diteliti oleh Aditya Nugroho pada tahun 2017. Hasil penelitiannya adalah kajian ini dilakukan berdasarkan dua aksi kegiatan dalam gerakan ini. Gerakan Pesan (Peduli Sampah Nasional) 2017 dibagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan pertama bertujuan untuk memberi edukasi kepada siswa SMA mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan kegiatan kedua aksi bersih sampah, tujuannya untuk mendidik masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dalam menangani metode sanitasi.

Perbedaan dari beberapa hasil penelitian terdahulu adalah hanya meneliti tentang implementasi yuridis pengelolaan sumber daya pesisir berbasis pengelolaan wilayah pesisir, bentuk partisipasi dalam kegiatan peduli lingkungan dan menjaga lingkungan pantai. Sedangkan, di penelitian ini lebih berfokus kepada peran Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, kendala yang dihadapi

Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan upaya Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai Di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai (Studi di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dilihat latar belakang diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bantuan dana yang diberikan oleh sumber dana masih minim.
2. Kualitas sumber daya manusia organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) masih rendah.
3. Minimnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan pantai ampiang parak.
4. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelamatan lingkungan pantai ampiang parak masih kurang.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis memfokuskan kepada peran organisasi Pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan (LPPL)

dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **D. Perumusan Masalah**

Pada batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan organisasi pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai Di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan .

2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dialami Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan organisasi pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai Di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan dan memperkaya khasanah keilmuan terkait dalam bidang Pendidikan Lingkungan Hidup yang mengkaji tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini berguna untuk :

- a. Organisasi pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL)

Untuk memberikan masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka untuk kemajuan kawasan konservasi penyu di pantai ampiang parak

b. Masyarakat

Untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya peduli terhadap lingkungan Pantai sebagai upaya dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

c. Penulis

Sebagai informasi untuk digunakan dalam bentuk bahan ajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan memberikan kesadaran kepada penulis bahwa pentingnya peduli terhadap lingkungan Pantai sebagai upaya dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai peran organisasi pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut.

1. Organisasi pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan memiliki peran penting dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. meliputi tahap perencanaan diantaranya (1) Mengkonsepkan paket kunjungan, meliputi paket edukasi tentang penyu dan paket edukasi terkait pengurangan resiko bencana; (2) menyiapkan bibit cemara dan bibit mangrove; (3) merencanakan kawasan pantai ampiang parak sebagai kawasan ekowisata berbasis pengurangan resiko bencana; (4) merencanakan pembuatan tracking mangrove.; (5) mengusulkan kegiatan snorkeling dan diving; (6) mempersiapkan kegiatan penyelamatan akses bangkai kapal belanda yang karang abad 1801; (7) merancang pembuatan sarana dan prasarana, seperti menara pantau, pos jaga, dan menara air bersih; (8) menyiapkan kebutuhan pengawasan, baik pengawasan di laut maupun di pantai. Tahap pelaksanaan diantaranya : (1) memberikan edukasi ke masyarakat baik itu siswa, mahasiswa, ataupun

masyarakat umum tentang pentingnya menjaga dan melestarikan penyusutan dari kepunahan; (2) melakukan kegiatan mitigasi bencana dengan penanaman mangrove dan cemara laut di sekitar pantai Ampiang Parak; (3) melakukan pembersihan pantai dari sampah plastik secara rutin; (4) mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola pantai Ampiang Parak. Tahap pengawasan diantaranya : pengawasan di laut dan di pantai. Dengan adanya peran tersebut maka dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Organisasi pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan mengalami kendala dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai yaitu kualitas sumber daya manusia masih rendah, bantuan yang diberikan oleh sumber dana masih minim, partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelamatan lingkungan pantai Ampiang Parak masih kurang, dan minimnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan pantai Ampiang Parak.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan organisasi pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) untuk mengatasi kendala kendala dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai diantaranya adalah pelatihan dan sosialisasi, memberikan bantuan dana maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan anggota pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan, serta pembinaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam bentuk mengoptimalkan peran organisasi pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan:

### **1. Bagi Pemerintah Tingkat Provinsi dan Kabupaten**

Pemerintah Tingkat Provinsi dan Kabupaten sebaiknya memberikan bantuan kepada pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan agar pokmaswas tersebut bisa melaksanakan program tersebut dengan optimal.

### **2. Bagi Pemerintah Kenagarian Ampiang Parak**

Diharapkan pemerintah kenagarian ampiang parak dengan organisasi pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan dapat saling membantu dalam pengelolaan lingkungan pantai, misalnya pemerintah kenagarian ampiang parak melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan tentang penyelamatan lingkungan pantai lebih ditingkatkan lagi agar dapat mengatasi kendala yang dialami pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan dalam partisipasi masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap kegiatan penyelamatan lingkungan pantai.

### 3. Bagi Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan

Organisasi Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan diharapkan dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar lebih tegas lagi, misalnya memberikan sanksi bagi masyarakat yang melakukan perbuatan melanggar hukum (mengambil dan menjual telur penyu) agar dapat memberikan efek jeranya terhadap masyarakat yang kurang peduli terhadap penyelamatan lingkungan, sehingga pelanggaran yang dilakukan masyarakat tidak ada lagi dan lingkungan di sekitar pantai ampiang parak bisa terjaga dengan baik dan terlestarikan.

### 4. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat ampiang parak dapat ikut dalam pengelolaan lingkungan pantai bersama organisasi pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan dan pemerintah nagari sehingga lingkungan pantai terjaga dan terlestarikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: P.T. Sofmedia.
- Dahuri, Rokhmin, dkk. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rangkuti, Ahmad Muhtadi. 2017. *Ekosistem Pesisir & Laut Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sara, La. 2014. *Pengelolaan Wilayah Pesisir (Gagasan Memelihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa)*. Bandung: Alfabeta.
- Soehartono,Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Soenarto. 2002. *Buku Pelatihan Manajemen Perlengkapan Sekolah, Pemeliharaan atau Perawatan*. Jakarta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Torang, Dr. Syamsir. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta
- Wirawan. 2008. *Budaya dan Iklim Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.